

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintahan di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi pemerintah tersebut, maka setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara transparan kepada public dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Menurut Mardiasmo dalam penelitian Muhammad Azlan (2015) *good governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif, pelaksanaan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut PSAK No.1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen instansi pemerintah untuk memberikan informasi

kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Muhammad Azlan dkk, 2015).

Laporan keuangan yang handal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Dapat diverifikasi yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Netralitas yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum yang tidak berpihak pada ketutuhan pihak tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Menurut Heni Sundari dan Sri Rahayu (2019) Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, faktor lain yang mendukung kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi sebuah entitas, dan sistem pengendalian intern serta pengawasan keuangan daerah. Faktor faktor tersebut dapat menciptakan publikasi laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Sebagai bentuk pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 mengenai perubahan SAP dari basis kas menjadi basis akrual, maka pada tahun 2015 seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi akrual.

Kompetensi sumber daya manusia yang mencakup kapasitasnya adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Siti chodijah dan Nurul Hidayah, 2018). Menurut Indriasih dalam Fidyah Yuli Ernawati (2019) Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Hendira Rita Kartika dan Dewi Amalia, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 setiap pemerintah daerah dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Heni Sundari dan Sri Rahayu (2019), menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Suci Reza Fauzi (2020) menerangkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik maka kompetensi sumber daya

manusia sangat dibutuhkan dan diperlukan, karena apabila kompetensi pembentuk laporan keuangan baik maka dimungkinkan hasil kinerja yang dihasilkan juga baik. Jika kompetensi SDM dari instansi yang mengeluarkan LKPD rendah/tidak baik maka kualitas LKPD yang dihasilkan kurang/tidak berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 selain membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dibutuhkan juga pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah entitas, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka banyak organisasi/entitas yang telah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis akuntansi guna mendukung kelancaran kegiatan operasi tersebut. Sutabri dalam Fidyah Yuli Ernawati (2019) menyatakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan terhadap teknologi informasi yang diterapkan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian dari Muhammad Azlan (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang berbeda adalah penelitian Muhammad Suci Reza Fauzi (2020) yang menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan suatu laporan keuangan yang baik maka harus memenuhi beberapa faktor penunjang, salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan secara optimal akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih akurat dan lebih cepat karena melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan yang bersifat material dan dapat menghemat waktu pengerjaannya. Namun harus dibarengi dengan pemeliharaan yang teratur serta perbaikan yang tepat waktu.

Selain membutuhkan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi, Intan Kurniawati (2018) menuturkan keterandalan laporan keuangan tersebut tercermin dari ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang andal terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Untuk itu, diperlukan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya sistem ini, maka akan sering terjadi kecurangan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi

dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan (Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011).

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Pengendalian internal. Pengendalian internal dibangun dari lima komponen sebagai berikut: lingkungan, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Arens, 2014:345). Sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh sebuah entitas atau organisasi bergantung kepada kualitas sebuah laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern akan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitria Akbariah (2018), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda adalah penelitian dari Karmila (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang dimiliki

instansi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena dengan sistem pengendalian internal yang baik akan melindungi instansi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindak kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia maupun sistem komputer.

Laporan keuangan juga bergantung terhadap pengawasan. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan terhadap sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Muhammad Azlan (2015).

Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Hafy Bagaswara (2019).

Penelitian Heni Sundari dan Sri Rahayu (2019) menyatakan bahwa Pengawasan terhadap sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan memiliki hasil yang berbeda. Penelitian dari Irfan Ikhwanul Haza (2015) menunjukkan Pengawasan Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Hafy Bagaswara (2019), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (relevance) dan reliabilitas (reliability). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang relevan dan reliabel tersebut dapat terwujud apabila dilakukan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 1.1.
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Entitas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prov. Jawa Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Blora	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Demak	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Grobogan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Karanganyar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Kebumen	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
14	Kab. Kendal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
16	Kab. Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Pati	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kab. Pemasang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kab. Purbalingga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
22	Kab. Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kab. Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kab. Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kab. Sragen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kab. Sukoharjo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kab. Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

28	Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kab. Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
31	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
32	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
34	Kota Semarang	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
35	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	Kota Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber :BPK RI

Dengan adanya fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum mampu memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. Opini dan temuan tersebut, kemudian akan menjadi faktor utama dalam menilai kualitas sebuah laporan keuangan serta menggambarkan bagaimana kinerja keseluruhan dari sebuah entitas.

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Heni Sundari dan Sri Rahayu (2019) dengan menambahkan variabel pengawasan keuangan daerah serta melakukan penelitian pada objek atau tempat yang berbeda. Penambahan variabel pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Kabupaten Kendal baru mampu mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 dari BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Agar predikat opini WTP ini dapat dipertahankan untuk tahun anggaran berikutnya, menurut PP No.71 Tahun 2010 ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Bagaimanakah pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
4. Bagaimanakah pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah
4. Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi mengenai perkembangan pengetahuan ilmudi bidang akuntansi yaitu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang saat ini masih banyak kekurangan dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya.

2) Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal serta pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

b. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan masukan serta alternatif mengenai kompetens SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.